

STRATEGI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM MENANGGULANGI KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU

Heru Santa

Email : Herusanta7@gmail.com

Dibimbing oleh Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

The purpose of this study is to determine how the implementation of strategy Department of Cleanness an Gardens in solving cleanes problems at Pekanbaru City. Pekanbaru City won a competiton as the cleanness city in Indonesia. Pekanbaru also got trophies seven times continuously. But in this few years, it couldn't be gotten anymore. Base on the result of this research, it found some factors that influence the implementing the Department of Cleanness an Dardens. Those are the highest number of society, work motivation, lowest of awareness society, the lowest society motivation, loweat control, in last the tools and medium. This research was done in Pekanbaru city. It in Department of Cleanness an Gardens exactly. The population and sample in this research are personnel or employee of Department of Cleanness an Dardens the technique of collecting sample used snowball sampling. The technique of collecting datas used the method of observation, interview and documentation after the data was collected. After coleecting the datas, it is analyzed by using descriptive qualitative analyzed. After doing this research, it found that the implementation strategy of Department of Cleanness an Gardens in solving cleanness problem in Pekanbaru City still did not maximal yet. The strategy of controlling the cleanness is still did not do well. It because the strategies are difficult to implement couse of some problems.

Keywords: *strategy, controlling of cleanness, factors, implementations*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 dan 14, begitu juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada dasarnya fungsi utama yang wajib

dilaksanakan oleh Pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan wajib yang pada hakekatnya merupakan bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, maka pelayanan publik untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan penyelenggara pembangunan serta pendayagunaan aparatur Negara yang berkualitas, efektif, efisien dan berwibawa.

Dalam pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti masalah sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum. Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Pekanbaru adalah : Masalah sosial

terutama masalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Dengan padatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang sudah berjumlah hampir 1 juta penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, permasalahan sampah semakin kompleks dan perlu dikelola secara profesional berdasarkan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi kebersihan. Penekanan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan Perda Nomor 10 Tahun 2012, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta SKPD lainnya. Untuk kelancaran pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru, maka keluarlah Keputusan Walikota Pekanbaru No. 07 Tahun 2004 Tanggal 01 Februari 2004 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.

Sebagai kota besar yang berhasil meraih penghargaan Adipura dari Presiden RI selama tujuh tahun berturut-turut, sungguh merupakan perjuangan panjang untuk selalu mempertahankannya. Pemerintah Kota Pekanbaru, terus berupaya agar kebersihan di kota bertuah ini terus meningkat, dan piala Adipura Kencana bisa raih sebagai prestasi tertinggi dalam menjadikan kota yang bersih dari sampah, serta teduh dan

nyaman bagi masyarakat umum. Akan tetapi yang terjadi sekarang, Kota Pekanbaru sudah tidak lagi mendapatkan penghargaan tersebut. Hal ini terlihat dari hasil penilaian tim adipura yang memilih kota lain sebagai kota terbersih di Indonesia.

Sistem penanganan sampah di Kota Pekanbaru masih mengikuti pola konvensional mulai dari kegiatan penyapuan jalan, pewadahan, pengumpulan sampah, penampungan sampah sementara di TPS dan pengangkutan sampah ke TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan setiap harinya mengangkut sekitar 350 ton padahal produksi sampah mencapai 610 ton lebih perharinya artinya ada sekitar 260 ton sampah yang tidak terangkut dan menumpuk di TPS seluruh Kota Pekanbaru (Sumber Dinas Kebersihan 2013).

Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menunjuk dan melimpahkan tugas tersebut pada Bidang Kebersihan Kota, sehingga permasalahan sampah dapat tertangani secara proporsional, efisien, efektif, dan ramah lingkungan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi kebersihan di kota Pekanbaru ?
- b. Bagaimana Penerapan Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan dalam menanggulangi Kebersihan di Kota Pekanbaru dapat terealisasi?

1.3 Tujuan Dan Mamfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk Mengetahui penerapan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi kebersihan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerpan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi kebersihan di Kota Pekanbaru.

1.3.2 Mamfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang cukup berarti untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilihat dari aspek praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk membuat strategi penanggulangan kebersihan di lingkungan kota Pekanbaru.
- b. Secara akademis penulis, ini berguna bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya tentang perilaku organisasi penelitian ini juga dapat menambah konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam upaya strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi kebersihan dimana petugas pengawas dan pelaksana di lapangan dapat bekerja dengan baik.

1.4 KONSEP TEORI

Konsep Strategi

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan strategi dalam

menanggulangi kebersihan yang dapat diterapkan di kota Pekanbaru, Menurut **O'Toole dalam Jhon M. Bryson** (2005:25) Strategi berasal dari kata *Stratego* dalam bahasa Yunani, gabungan dengan *stragos* atau tentara, dan *ego* atau pemimpin. menurut **Fred. R. David** (2006:8) strategi manajemen adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu mengaitkan keunggulan, strategi pemerintah dengan tantangan lingkungan dan direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh penyelenggaraan pemerintah.

Strategi merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan akhir “ sasaran “ akan tetapi strategi adalah rencana yang disatukan dan strategi itu dapat mengikat semua bagian dari penyelenggara pemerintahan menjadi satu strategi itu menyeluruh dan strategi meliputi semua aspek penting dalam pemerintah maupun penasehat swasta serta strategi itu terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian (**Fred.R.David**, 2006:11)

Selanjutnya menurut **Rangkuti** (2003:16) Pada prinsip strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) tipe antara lain :

1. Strategi Manajemen

Strategi manajemen adalah meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh Manajemen pemerintahan dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi diskusi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan seterusnya.

2. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi investasi misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau perusahaan, strategi pengembangan kembali suatu visi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

3. Strategi Bisnis

Strategi ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi organisasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa bentuk yang bertujuan sama yang mana tujuannya adalah pencapaian tujuan akhir dari suatu organisasi dalam tindakan yang bersifat senantiasa mengikat dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang masing-masing orang atau para pelanggan untuk kedepan. Dengan demikian Perencanaan strategi hampir selalu dimulai dengan kata “ Apa yang dapat terjadi ? “ bukan dimulai dari kata “ Apa yang terjadi? “ (**Hamel dan Prahalad** 2007:21)

Selanjutnya Strategi menurut (**Salusu**.2006:101) ada empat tingkat strategi, keseluruhannya disebut dengan master strategi antara lain:

1. Enterprise strategy

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol.

2. Corporate strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategy yang meliputi bidang yang diguluti oleh organisasi.

3. Business strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana pasaran ditengah masyarakat bagaimana menempatkan organisasi di tengah para pengusaha (pemerintah), para pengusaha, para legislatif, para politisi dan sebagainya.

4. Functional strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain, ada tiga jenis strategi fungsional antara lain:

- a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b. Strategi fungsional manajemen yaitu mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu: Planning, Organizing, Implementing, Controlling, Staffing, Motivating, Communicating, Decision making, Representing, dan Integrating.
- c. Strategi isu strategis, fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui maupun situasi yang berubah-ubah.

Perencanaan Pemerintah Kota yang strategis, di bidang Kebersihan adalah sebagai upaya yang mendisiplinkan warganya untuk berbuat tertib, taat dan patuh terhadap keputusan dan aturan Pemerintah dalam tindakannya terhadap kebersihan sehingga menjadi lingkungan kota dan pemukiman yang bersih, nyaman, dan sehat. Mengapa pemerintah kota ini yang terbaik untuk menciptakan kota yang bersih.

Seperti yang dikatakan **Bryson** (2005:4) bahwa strategi manajemen Pemerintah dapat membantu suatu organisasi satuan kerja dibawahnya.

Selanjutnya menurut pengelola perda tersebut diatas bahwa pengendalian dan pengelolaan kebersihan dilakukan oleh Pemerintah kota yang dikonsentrasikan pada Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Bersama pihak Kecamatan untuk mencapai tujuan agar pengendalian kebersihan dapat dicapai Kota Pekanbaru beserta jajarannya melakukan strategi fungsional manajemen yaitu suatu strategi menjalankan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengawasan, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi kerja, dan integritas serta pelaksanaan kerja

1.5 METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru, Penulis memilih lokasi ini karena Kota Pekanbaru sekarang tidak mendapatkan lagi piala Adipura yang selama beberapa tahun terakhir Kota Pekanbaru dapatkan.

2. Informan penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif seperti menurut Badgan dan Taylor dalam bukunya (Moleong,2004:3) metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh atau menyeluruh)

Selain itu penulis juga menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan study kasus (Creswell.2006.61) dan YM. 2004) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata ketika balasan antara fenomena dan konteks tidak terbukti secara jelas dengan menggunakan berbagai sumber termasuk observasi.Wawancara, dokumen atau laporan.Dalam ini peneliti menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti melalui sumber-sumber tersebut.

Objek penelitian ini pada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala seksi, camat, warga masyarakat, dan petugas kebersihan.Pemilihan informan dilakukan melalui teknik Snowball Random

sampling, sedangkan objek penelitian adalah strategi pemerintah terhadap pengendalian kebersihan di Kota Pekanbaru.

Terkait dengan masalah penelitian teknik pengumpulan data diperoleh dari teknik wawancara tak terstruktur yang mirip percakapan informal (Mulyana.2004.180). Wawancara juga dilakukan dengan maksud untuk memverifikasi data untuk menentukan keabsahan data dari apa yang telah dan akan diobservasi. Miles dan huberman (2003.16) bahwa analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.Pada yang dilakukan analisis melalui tahap-tahap kategori mereduksi data, data yang dikelompokkan kemudian disusun dalam bentuk narasi.

3. Jenis dan sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari responden dalam pelaksanaannya diperoleh dari wawancara dan jawaban responden pada pertanyaan yang telah di berikan kemudian pengamatan langsung di lapangan.Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi ataupun opini dari informasi mengenai strategi pengendalian kebersihan yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan laporan yang ada yang berkaitan dengan masalah kebersihan, volume sampah, jadwal pengangkutan, dan motivasi kerja petugas kebersihan dalam penelitian ini dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa gambaran umum sarana dan prasarana disediakan oleh kantor Dinas kebersihan dan Pertamananserta data yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pengendalian kebersihan di Kota Pekanbaru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Yaitu mengadakan kegiatan yang menghimpun data dilapangan dengan mengenakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

b. Wawancara

Yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti dalam wawancara bebas namun tetap terikat dengan pokok-pokok masalah dan tujuan penelitian (wawancara bertahap/bebas terpimpin). Adapun Informan penelitian antara lain Kabid Kebersihan Kota, Camat, Lurah dan Masyarakat.

c. Observasi

Yaitu pengamatan langsung oleh penulis dilapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena social dan gejala yang ada dilokasi penelitian, untuk mendukung keabsahan data dari apa yang telah dan akan di observasi.

d. Studi kepustakaan dan Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan lembaga, laporan rapat, foto, dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, bulletin atau berita-berita yang disiarkan ke media massa yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi kebersihan

3.1.1 Strategi dibidang pengangkutan sampah

Dalam kegiatan pelaksanan pengangkutan sampah yang telah menumpuk di TPS agar dapat diambil dan mengangkut ke TPA diperlukan armada angkutan serta alat dan petugas kebersihan yang siap. Oleh Karena dalam melaksanakan diperlukan penatan administrasi operasional pengangkut sampah perlu di diperbaiki dan dievaluasi dibidang pengangkutan sampah agar kinerja dapat berjalan dengan baik. Strategi dibidang pengangkutan sampah telah diatur, tersistem, dan terjadwal dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas pengangkut sampah, pengambilannya sudah diatur dalam jadwal jam berangkat mulai pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 07.00 pagi dan sore hari pukul 16.00 sampai selesai dan diatur dalam dua shif. Strategi ini sampai saat ini masih dijalankan, namun dilapangan aktivitas pengangkutan sampah tersebut sering juga tidak lancer, hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah armada yang siap jalan, kondisi armada yang sudah tua dan tidak layak jalan, dan tidak sebandingnya jumlah armada dengan besaran jumlah sampah yang lebih besar, pengangkutan sampah yang efektif dan efisien ditentukan oleh kinerjanya apabila kecepatan waktu angkut terpenuhi, ketepatan waktu perjalanan dari TPS ke TPA , kondisi layak jalan dan keandalan petugas mencapai waktu yang telah ditentukan.

Strategi pengangkutan sampah saat ini merupakan salah satu solusi pembersihan tumpukan sampah di TPS dan tempat lainyang bukan tempat pembuangan sampah, yang saat ini kondisinya semakin semeraut, tidak hanya merusak pemandangan , bau sampah yang menyengat dan tidak sedap menyabar

kemana-mana, oleh karena itu upaya pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pihak kecamatan dalam menjalankan strateginya untuk pengangkutan berusaha mengurangi volume sampah yang menumpuk dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/industry, perumahan agar tetap menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

“ Terangcutnya sampah yang menumpuk di TPS tepat waktu dan tidak ada bersisa adalah keinginan kita semua, semuanya itu tergantung bagaimana kita dapat memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang ada dan mamaksimalkan kekuatan yang kita punya, tentunya dengan kordinasi yang baik pula. (Wawancara dengan Sekcam kec. Tampan 04 juni 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa strategi pengangkutan sampah sudah ditetapkan dengan memaksimalkan seluruh armada yang ada, dengan armada yang berjumlah 96 unit diharapkan tumpukan sampah yang ada dapat terangcut tepat waktu, dan kecepatan waktu angkat merupakan salah satu tolak ukur kinerja pengangkutan sampah itu dapat dikatakan baik atau tidak, itu semua sesuai dengan yang dikatakan Fitzsimons (2004:21) tentang pengangkutan sampah.

3.1.1.1 Membersihkan Tumpukan Sampah di Setiap TPS di Kota Pekanbaru

Strategi yang dibuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya menanggulangi sampah agar berkurang dan dapat dibersihkan dan dalam mengangkut sampah, agar semua sampah yang ada di TPS maupun yang ada dipinggir jalan dapat terangcut maka pihak Dinas Kebersihan dan Kecamatan bekerja

sama satu sama lain untuk mengurangi tumpukan sampah di TPS maka dalam hal ini keduanya berupaya keras agar bersih dari sampah.

3.1.1.2 Terwujudnya kebersihan di Wilayah Kota Pekanbaru

Untuk mengendalikan sampah-sampah agar tidak menumpuk dan berserakan pihak Dinas Kebersihan dan Kecamatan mengerahkan seluruh armada agar sanggup untuk mengendalikan sampah yang ada dan yang menumpuk di TPS maupun yang dipinggir jalan dan diperumahan warga, sehingga kondisinya betul-betul bersih, walaupun ada factor lain yang dapat mengganjal pelaksanaan pengangkutan sampah ini namun dapat diatasi dengan segera contohnya produksi sampah di kecamatan tampan yang sangat besar karena jumlah penduduk yang juga besar dapat diangkut dengan baik sampai ke TPA, dengan demikian kebersihan dapat terwujud walaupun masih banyak kendala yang terjadi namun hambatan ini dapat di atasi.

Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

“ Sekarang yang menjadi Fokus kita bersama adalah bagaimana masalah sampah yang ada di kota Pekanbaru ini apakah tumpukan sampah dan yang lainnya itu dapat kita atasi dengan baik, jadi kita sudah menetapkan prioritas utama kita adalah membersihkan seluruh tumpukan sampah yang ada agar Visi Misi DKP dapat tercapai. (Wawancara dengan Kabid Kebersihan Kota 03 juni 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat yang menjadi fokus utama dalam mengatasi masalah sampah sekarang bagaimana seluruh tumpukan sampah yang ada dapat terangcut ke TPA agar tidak ada lagi sampah yang masih berserakan dan menumpuk di pinggir jalan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta pihak

Kecamatan dalam memaksimalkan daya angkut sampah agar masalah sampah dapat diminimalisir dengan mengupayakan atau memaksimalkan seluruh armada yang ada, agar masalah pengangkutan sampah dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah mengajukan armada dan alat berat melalui APBD untuk penambahan sarana prasarana pengelolaan sampah.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

“ Dalam masalah kebersihan ini yang menjadi masalah yang paling besar adalah kurang aktifnya masyarakat dalam mengendalikan sampah yang ada, sampah selalu dibuang sebarangan dan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan, dan masyarakat kurang dapat bekerja sama dalam mengendalikan masalah sampah ini, ini lah yang menjadi masalah paling besar dalam pengendalian kebersihan (Wawancara dengan Kabid kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, 03 juni 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam mengatasi masalah sampah ini seluruh instansi dan elemen masyarakat harus ikut serta dalam pengendalian kebersihan di kota Pekanbaru ini, instansi pemerintahan harus tetap serius dalam mengatasi masalah sampah ini dengan memberikan prioritas utamanya, sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh DKP karena misi kota Pekanbaru yang ingin menjadi kota yang bersih, dan dari pada itu sangat diharapkan juga peran aktif masyarakat dalam pengendalian kebersihan itu sendiri dengan tidak membuang sampah disembarangan tempat dan tetap menjaga kebersihan.

3.1.1.3 Kecepatan Waktu Angkat Sampah

Terangcutnya sampah yang berada di TPS seluruh ruang lingkup kerja Dinas

Kebersihan dan Kecamatan dikarenakan kesigapan petugas kebersihan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas kebersihan sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan mulai pukul 05.00 pagi sampai 07.00 WIB dan pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai, sesuai dengan tanggung jawabnya masing – masing sehingga masalah sampah dapat teratasi.

3.1.1.4 Adanya Perda, SK Walikota dan Peraturan lainnya yang menjadi payung hukum.

Dalam hal melaksanakan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan di seluruh Negara ini dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan memerlukan atau di jamin oleh peraturan (payung hukum) yang menjadi landasan dalam segala aktifitas pengendalian kebersihan di Kota Pekanbaru ini.

Pelaksanaan kegiatan Kebersihan baik itu pengangkutan, pengelolaan dan pengendalian sampah agar telaksana dengan baik sudah di atur dalam Peraturan Daerah dan SK Walikota dalam bentuk junglak atau petunjuk teknis tentang pelaksanaannya, semuanya menjadi pedoman yang yang di laksanakan oleh Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan dan itu menjadi tanggung jawab dan pedoman masing – masing, yang berdasarkan pada Perda dan SK Walikota Nomor 7 tahun 2004. Disamping itu teknis tentang pengelolaan dan pengendalian kebersihan serta pembagian wilayah kerja, dan semuanya itu diatur dalam SK Walikota yang meliputi kebersihan di 23 ruas jalan protokol dan kecamatan mengambil wilayah di TPS setempat.

3.1.2 Strategi Bidang Pengelolaan Sampah

Dinas kebersihan dan Pertamanan yang ada sebagai salah satu instansi

pemerintah daerah berperan penting dalam melakukan pengelolaan dan penanggulangan untuk menjadi Kota Pekanbaru yang bersih dan bebas dari sampah. Untuk itu pihak yang terkait berupaya semaksimal mungkin melakukan usaha mencari dan melaksanakan kegiatan mulai dari menyusun program atau perancangan pembangunan dan merealisasikan kelengkapan guna mewujudkan kota Pekanbaru yang bersih dan sehat.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru beserta instansi terkait lainnya melaksanakan strategi dalam pengelolaan sampah dengan memakai alat teknologi tinggi seperti Sanitary, Landfill, dan Reduce Reuse Recycle (3R) serta inciator dumping yang operasionalnya berada di TPA Muara Fajar, dengan memakai alat ini diharapkan dapat memaksimalakna pengelolaan sampah dan mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

3.1.2.1 Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja sama dan saling berkordinasi dengan antara lintas sektor dan pelaku usaha / swasta diharapkan ikut serta dalam pengelolaan sampah pengangkutan dan terutama pengendalian sampah dan masyarakat diharapkan menjadi peran utama dalam mewujudkan kota yang bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil penelitain dari penulis selam ini pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kecamatan dan kelurahan hanya memberikan sosialisasi mengenai pembuatan kompos sampah organik tanpa adanya pelatiahn yang lebih dalam mengenai pengelolaan sampah maka masalah kebersihan tidak dapat tertangani dengan maksimal dan baik.

3.1.1.2 Strategi Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Meningkatkan saran dan prasara kebersihan merupakan strategi yang paling utama dan terprogram dalam kegiatan kebersihan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan kecamatan, namun usulan dalam menambah sarana dan prasarana belum sepenuhnya dapat memaksimalkan daya angkut sampah yang menumpuk di TPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

“ Dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang terkait dengan pengendalian kebersihan sebenarnya yang menjadi kelemahan terletak pada SDM, fasilitas TPS , saran dan prasarana dan dana opsional, dan yang paling utama adalah kurangnya peran aktif masyarakat dalam mengendalikan kebersihan. (Wawancara dengan Kabid Dinas Kebersihan dan Pertamanan 03 juni 2014).

Dari hasil penelitian penulis selama ini yang menjadi masalah yang paling besar dari pengendalian kebersihan dikota pekanbaru adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, dilapangan masih sangat banyak masyarakat yang menumpuk smapah bukan di TPS akan tetapi disepanjang jalan.

3.1.2.3 Meningkatkan dan memberdayakan alat pengelolaan sampah dan pemamfatan sampah

Dizaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang dalam pengelolaan sampah sekarang memakai teknologi tinngi, dimana teknologi ini memakai system pengelolaan sampah organik dan non organik dipisah jenis sampahnya lalu ada yang dipisah menjadi composting dan untuk dijadikan pupuk organik.Sementara sampah non organik dapat di daur ulang untuk dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis.

3.1.3 Strategi Pengendalian Sampah

Dalam proses pelaksanaan pengendalian persampahan di kota Pekanbaru Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan upaya sekeras mungkin dalam hal pengendalian kebersihan hal itu terlihat dari upaya dalam melibatkan seluruh anggota masyarakat, instansi pemerintahan dan lainnya, Dan juga berupaya bersama – sama untuk tetap selalu mengawasi seluruh elemen yang terlibat dalam pengendalian kebersihan dalam hal ini petugas kebersihan di lapangan, dalam hal pengendalian sampah yang kurang maksimal dalam hal pengendalian sampah tentu perlu di evaluasi dan di kaji ulang apa saja yang menjadi kendala dalam hal pengendalian ini dan Camat yang bertanggung jawab atas hal itu perlu melakukan kerja ekstra dalam pengendalian ini dan itu sudah masuk kerana public dan selalu menjadi perdebatan dan pembahasan di publik.

Dalam mengatasi permasalahan sampah di kota Pekanbaru sekarang ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan berencana untuk memberikan tugas pengendalian kebersihan ke pihak II dalam hal ini pihak swasta, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan instansi yang terait tidak perlu terlalu pusing lagi dalam hal pengendalian kebersihan dan hanya melakukan pengawasannya saja. Dan hal ini mungkin akan lebih baik dan lebih efisien dalam pengendalian kebersihan di kota Pekanbaru ini yang semakin besar.

3.1.3.1 Meningkatkan Pengawasan di Lapangan

Untuk terlaksananya strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan seluruh instansi yang terkait dalam hal yang meliputi pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pengendalian sampah maka diperlukan peningkatan pengawasan di

lapangan agar seluruh tujuan yang sudah ditetapkan bersama, dalam hal ini adalah aktivitas kerja petugas yang ada di lapangan agar kinerja petugas tersebut dapat selalu terawasi dengan baik. Sehingga tidak ada penumpukan – penumpukan sampah yang di TPS dan pinggiran jalan yang dijadikan TPS oleh warga masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“ Kami dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru selalu dan akan tetap mengawasi kinerja seluruh elemen yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebersihan di kota Pekanbaru ini, agar keinginan dan cita-cita kita untuk Pekanbaru yang bersih dari sampah dapat kita wujudkan. (Wawancara dengan Kabid Dinas Kebersihan dan Pertamanan 03 juni 2014).

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengawasan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan dan mengevaluasi kinerja suatu kegiatan, dan untuk meningkatkan hasil kinerja organisasi kita harus meningkatkan pengawasan dilapangan agar kegiatan berjalan dengan maksimal.

3.1.3.2 Meningkatkan Sumber daya Manusia

Dalam melaksanakan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi hal paling mendasar adalah sumber daya manusia, petugas kebersihan perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan tingkat produksi sampah yang semakin meningkat sebagai kota yang akan menjadi kota metropolitan yang dapat di lihat dari jumlah penduduknya.

Kemudian dari pada itu untuk melaksanakan penerapan strategi pengendalian kebersihan diperlukan orang – orang yang professional atau SDM yang baik sebagai pelaksana kegiatan kebersihan, dan instansi yang terakut telah membekali latihan khusus kepada petugas kebersihan yang bertanggung jawab terhadap bagian tugasnya dalam hal pengendalian kebersihan.

3.1.3.3 Terwujudnya Kebersihan di Kota Pekanbaru

Untuk mewujudkan kebersihan di kota Pekanbaru maka seluruh elemen harus bergerak serentak dalam kegiatan kebersihan, baik itu yang dilakukan oleh lembaga suadaya maupun yang lainnya, semua harus dilakukan di seluruh bagian yang selalu menjadi masalah – masalah kebersihan baik itu di jalan raya, sekolah, perumahan, dan yang lainnya dan kegiatan itu semua harus melibatkan masyarakat sehingga rasa kebersamaan dan rasa pentingnya kebersihan dapat merasuki fikiran masyarakat dan melaksanakan kegiatan kebersihan yang ditetapkan oleh RT dan RW agar kebersamaan dapat tetap terjalin.

3.1.3.4 Jumlah Personil, Sarana dan Prasarana Kebersihan

Dalam pengelolaan dan penanggulangan kebersihan yang paling menjadi pokok yang harus di dapatkan adalah adanya jumlah personil yang memadai, kondisi prasarana yang bagus dan dapat di mamfaatkan dengan baik serta hal yang lainnya yang berkaitan dengan tugas pengelolaan dan pengendalian dapat terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“ Sebenarnya yang menjadi masalah penanggulangan kebersihan sebenarnya hal itu lah, sarana prasarana, dan yang paling mendasar SDM nya (

Wawancara dengan Sekcam kec. Tampan, 04 juni 2014)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ambil garis besarnya kurangnya sarana dan personil kebersihan merupakan salah satu hal yang mendasari tidak terciptanya pengendalian kebersihan yang maksimal itu terlihat dari jumlah personil yang hanya 429 orang sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 800 orang, jumlah sarana dan prasarana pendukung lainnya yang juga kurang baik itu armada angkutan sampah, fasilitas tong sampah bahkan hal yang kecil seperti skop, garuk, keranjang sampah itu semua dirasa sangat kurang untuk pengendalian kebersihan hari ini.

3.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerapan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi kebersihan di kota Pekanbaru.

3.2.1 Jumlah Penduduk yang Padat

Jumlah penduduk yang semakin hari semakin besar akan memberikan ancaman jumlah produksi sampah yang semakin besar pula, dan itu akan membuat kesulitan dalam mengendalikan penerapan strategi Dinas Kebersihan dan pertamanan.

Bertambahnya jumlah penduduk sudah tentu beriringan juga dengan bertambahnya pula produksi sampah di kota Pekanbaru dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebersihan juga menjadi penyebab dari masalah sampah yang menghinggapi kota Pekanbaru hari ini.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

“ Bertambahnya jumlah penduduk juga menjadi salah satu ancaman yang dihadapi Dinas Kebersihan hari ini, karena pertumbuhan penduduk tentu beriringan dengan bertambah produksi sampah di kota ini, dan itu tentu membuat semakin sulit kita untuk mengendalikan

kebersihan, untuk itu harus seiring juga dengan pertambahan jumlah armada dan personil (Wawancara dengan Kabid Kebersihan 03 juni 2014)

3.2.2 Motivasi Kerja

Motivasi sangat diperlukan untuk dipahami karena melalui motivasilah seseorang dapat bekerja dengan hasil yang lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya, semuanya berkaitan dengan semangat kerja seseorang ataupun sebuah kelompok, begitu motivasi rendah akan berdampak juga dengan kinerja organisasi.

Untuk membuat pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun kecamatan langsung terlibat dalam penanganan pengelolaan sampah perlu adanya motivasi dari pimpinan untuk lebih semangat untuk bekerja.

Berikut ini wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

“ Dalam kegiatan penanggulangan kebersihan kita selaku pimpinan instansi selalu memberikan motivasi kepada seluruh elemen penggerak dalam kegiatan kebersihan mulai dari yang paling atas sampai paling bawah, semangat itu harus kita berikan kepada seluruh petugas kebersihan, dengan adanya motivasi kerja maka petugas akan bersemangat dalam melaksanakan tugasnya masing – masing. (Wawancara dengan Sekcam Kec. Tampan 04 juni 2014)

3.2.3 Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan menjadi salah satu factor yang mempengaruhi penanggulangan kebersihan di Kota Pekanbaru, ditandai dengan tidak pedulinya masyarakat untuk membuang sampah, banyak masyarakat membuang sampah sembarangan di tepi jalan atau pun tempat – tempat umum lainnya.

Berikut ini wawancara dengan informan penelitian berikut :

“ Partisipasi masyarakat yang sangat kurang memang menjadi ancaman yang di hadapi oleh Dinas Kebersihan saat ini, karna masyarakat banyak yang membuang sampah padah tempat umum, selokan, dan pinggir jalan. Itu dapat menyebabkan tumpukan sampah yang tidak dapat di kendalikan. Dan itu mengakibatkan kota tidak lagi bersih. (Wawancara dengan Kabid Kebersihan 03 juni 2014)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat rendahnya kesadaran masyarakat juga sangat berpengaruh besar terhadap pengendalian kebersihan, sangat banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya bahkan ditempat umum sekalipun.

3.2.4 Partisipasi Masyarakat untuk berperan dalam Pengendalian Kebersihan

Keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam mendukung pengendalian kebersihan, masyarakat ikut menciptakan suasana kebersihan antara lain :

- Terpeliharanya kebersihan lingkungan kebersihan
- Partisipasi masyarakat di bidang kebersihan meningkat
- Terangkutnya sampah tepat waktu
- Kesadaran masyarakat tentang kebersihan masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

“ adalah tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang ikut berperan dalam penanggulangan kebersihan, hal itu ditandai dengan masyarakat dapat membuang sampah di tempat sampah sehingga kebersihan dapat terjaga.

(Wawancara dengan masyarakat 05 juni 2014).

“ partisipasi masyarakat untuk ikut serta dan berperan dalam pengendalian kebersihan sangat kita harapkan, karna kunci masalah sampah itu salah satunya ya, masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak mau menjaga kebersihan bersama. (Wawancara dengan Sekcam Kec. Tampan 04 juni 2014)

3.2.5 Faktor Pengawasan

Peranan pengawasan sangat penting dalam pengendalian kebersihan pengawas dapat langsung turun kelapangan untuk mengawasi petugas lapangan sehingga kualitas kinerja dalam hal ini pelayanan terhadap kebersihan dapat ditingkatkan keran adanya kontrol yang jelas terhadap hal ini. Faktor pengawasan sangat diperlu dalam hal untuk mengendalikan kegiatan kebersihan tidak sering terkadang pengawas tidak berada ditempat untuk mengawasi kinerja anggotanya sehingga kegiatan pengangkutan sampah seringkali tidak sesuai dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Pengawasan bagi aparat dan petugas kebersihan perlu ditingkatkan terutama pada jam kerja yang sudah ditetapkan sehingga hasil kinerjanya juga dapat berjalan semaksimal mungkin, saat ini lemahnya pengawasan menjadi penghambat dalam pengendalian kebersihan.

Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

“ Rendahnya kinerja pengangkutan sampah di lapangan sebenarnya disebabkan karena rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas lapangan, untuk masa yang akan datang yang perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita memperbaiki sistem pengawasan, karena berhasil tidaknya pengendalian kebersihan dapat

diukur dari bagaimana pengawasn lapangan berjalan dengan baik atau tidak. (Wawancara dengan Kabid kebersihan DKP 03 juni 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwasanya pengawasan sangat menentukan dan menjadi salah satu hal yang paling vital dalam pengendalian kebersihan sesuai dengan teori Bintaro Tjokroaminoto 2004:68 yang mengatakan manajemen kebijakan strategi itu yang menjadi salah satu indikator keberhasilannya yaitu manajemen pengawasannya itu sendiri.

3.2.6 Faktor Sarana dan Prasarana Kebersihan

Sarana dan prasaran merupakan hal yang paling mendasar dan yang menjadi tolak ukur efektif tidaknya pengendalian kebersihan, dari hasil penelitian dapat dilihat kurang memadainya sarana dan prasarana kebersihan pengangkutan sampah apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertumbuhnya kota menjadi kota besar, semuanya itu sangat jauh dari yang diharapkan bagaimana bisa pengangkutan sampah dapat berjalan dengan lancar, dan tepat waktu jika kondisi sarana dan prasaranya tidak mendukung secara penuh.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

“ Sarana dan prasarana merupakan factor paling menentukan dalam kegiatan pengendalian kebersihan, dalam hal ini untuk mencapai tujuan dari Dinas Kebersihan dan pertamanan untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. (Wawancara dengan Kabid kebersihan 03 juni 2014)

SIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh di lapangan dan dari informan serta beberapa informasi lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru telah dibuat dan disusun dengan sebaik mungkin berdasarkan teori kebijakan, baik tentang proses pengangkutan, pengelolaan sampah dan pengendalian sampah sudah terlihat dari tumpukan sampah yang sudah mulai berkurang, terjaganya kebersihan, kecepaan waktu angkat, pemberdayaan alat pengelolaan sampah, meningkatkan peran waktu masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan, meningkatkan pengawasan lapangan, kebersihan terwujud dan meningkatkan sumber daya manusia, akan tetapi seperti yang peneliti amati strategi pengendalian kebersihan belum bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dikarenakan strategi yang ada cukup sulit untuk di implementasikan dikarenakan oleh beberapa hal.
2. Faktor Penghambat terhadap strategi Dinas Kbersihan dan Pertamanan :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian kebersihan
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan
 - c. Kurangnya pengawasan di lapangan
 - d. Motivasi kerja petugas yang kurang
 - e. Disiplin petugas yang kurang
 - f. Jumlah personil yang sangat terbatas

Faktor - faktor diatas adalah yang menjadi penghambat paling besar dalam penanggulangan kebersihan di kota Pekanbaru sehingga strategi yang telah

disusun dan ditetapkan bersama tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

SARAN

Pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas kebersihan dan Pertamanan, Kecamatan dan Pihak yang terkait lainnya hendaknya dapat memaksimalkan seluruh upaya dan tenaga dalam kegiatan pengendalian dan pengelolaan sampah yang ada dikota Pekanbaru ini. Apalagi seperti yang kita rasakan sekarang ini dengan perkembangan kota yang terus meningkatkan dan ancaman yang semakin besar dengan bertambahnya jumlah penduduk kota Pekanbaru hendaknya terus memberikan pembenahan yang sangat serius dan perlu mengevaluasi kinerja dari seluruh pihak yang terkait dengan penanggulanagn kebersihan supaya kedepanya dapat berjalan efektif dan efesien sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar keinginan bersama sesuai yang tertuang di Visi Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru “ Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau, indah dan Gemerlap menuju Kota Metropolitan yang Madani dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Kurniawan, Agung, 2006. *Pelayanan Umum*. Indonesia. Penerbit Ghillia
- Ansoff, 2005. *Strategi Manajemen*. Jakarta. Penerbit LP3ES
- Agus, 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Penerbit Gaja Mada Pers
- Djokrominoto, Bintaro. 2004. *Manajemen Strategi*. Jakarta. Penerbit BP Jakarta
- Bodgan dan Taylor, Moeung, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Penerbit PT. Elekmedia Jakarta

Byson. 2004. *Perencanaan Strategi*. Jakarta. Penerbit Bina aksara

Bryson, J. M. 2001. *Strategi Planing Publik and Non Provit Organization*, Penerbit Fransisco, Publis

CressWell dan Yin, 2004.*Metode Penelitian*. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka.

David, Fred. R, 2006.*Strategi Manajemen*, Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka

Fitsimons. 2004. *Personal Manageman*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka

Handiko, 2005.*Managemen Personaliala SDM*. Yogyakarta Penerbit UGM Yogyakarta

Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Penerbit ALFA Beta Bandung

Hunger dan wheelen, 2006. *Proses Manajemen Strategi*. Jakarta Penerbit CV Rajawali Jakarta

Syafie, Inu Kencana. 2004. *Pelayanan Inastansi Pemerintahan*. Jakarta penerbit G. Pustaka

Mas' oed, 1994.*Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar

Moenir. 2006. *Pelayanan Terpadu Perizinan*. Yogyakarta. Penerbit Obor Yogyakarta

Parasuman, 2002. *Managemen Kualitas*, Yogyakarta. Penerbit Pustaka Ghliam

Rangkuti, 2006.*Kebijakan Strategi*. Jakarta. Penerbit ISBN

Wasistino, Sadu. 2005. *Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit UGM Yogyakarta

Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia

Sugiano. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfa Beta

Weelen, Thomas & Hunger, Davit. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Widjaya, 1997.*Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta : Bina Angkasa

B. Ilmiah

Eliswati, *Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi kebersihan di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*, 2012

C. Dokumen Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Restribusi Kebersihan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi kebersihan.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru